

ANALISIS DAYA SAING DAN POTENSI SCALE-UP UMKM JAWA BARAT

Abstraksi

Populasi usaha UMKM di Jawa Barat mendominasi hingga 99,87%, dengan kontribusi nilai ekonomi sekitar 28,27%. Tingkat penggunaan komputer dan internet masih minim. Dengan pendekatan metode Analisis Komponen Utama (AKU) disusun indeks komposit daya saing UMKM. Kota Bekasi merupakan wilayah dengan IDS tertinggi, disusul Kota Depok dan Kota Bandung. Daya saing terendah di Pangandaran, Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya. Laporan Indeks Pembangunan TIK Provinsi Jawa Barat tahun 2016 menunjukkan kategori tinggi. Program unggulan Jawa Barat bertujuan mengakselerasi *scale-up* ekonomi UMKM. Jika dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, efektif, efisien dalam kerangka sistem Satu Data Pembangunan, niscaya akan dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan hidup dan menurunkan kemiskinan.

Kata kunci: UMKM; daya saing; literasi digital; pendapatan; kesejahteraan

A. Pendahuluan

Daya saing telah menjadi perhatian secara global dari berbagai pemangku kepentingan baik pelaku bisnis, pemerintah di semua tingkatan, peneliti/analisis/akademisi, dan sebagainya. Di tingkat nasional, peringkat Indonesia mengacu pada laporan tahunan *Global Competitiveness Report* yang dikeluarkan *World Economic Forum* (WEF). Kondisi nasional merupakan agregat dari gambaran seluruh wilayah regional/daerah.

Pada level daerah (antar Provinsi/Kabupaten/Kota) belum ada penghitungan indeks daya saing (IDS) yang menjadi rujukan resmi. Penyediaan informasi melalui pemetaan daya saing usaha menjadi sangat strategis, untuk penyusunan berbagai kebijakan dan program terkait.

Hasil Sensus Ekonomi Lanjutan (SE-2016 Lanjutan) di Jawa Barat terdapat 4,6 juta usaha yang 99,87% diantaranya merupakan usaha berskala Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dari sisi omset usaha, UMKM berkontribusi 28,27% dari total nilai omset yang hampir mencapai 3.500 triliun. Saat ini UMKM menjadi primadona sasaran program unggulan pemerintah. Bagaimana daya saing UMKM tersebut, baik dari sisi kewilayahan, maupun kategori usaha? Bagaimana potensi pengembangannya di masa yang akan datang?

Dan UMKM ini riil berbasis ekonomi kerakyatan (padat karya-bukan padat modal), sehingga dapat signifikan berperan dalam peningkatan pendapatan perkapita, kesejahteraan hidup masyarakat, serta penurunan kemiskinan.

Melalui serangkaian program unggulan pemerintah provinsi Jawa Barat berharap tercapai visi “Jabar Ngabret” (artinya: Jabar berlari, menunjukkan adanya akselerasi). Program unggulan tersebut merupakan upaya akselerasi *scale-up* melalui digitalisasi ekonomi, diantaranya adalah *One Pesantren One Product* (OPOP), *One Village One Company* (OVOC), Desa Digital, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan adalah butuh berapa lama visi tersebut bisa tercapai?

Salah satu misi pemerintah provinsi Jawa Barat secara eksplisit menyebutkan upaya meningkatkan Daya Saing usaha berbasis inovasi, seperti pada gambar berikut:

Gambar 1. Misi ke-4 Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018-2023

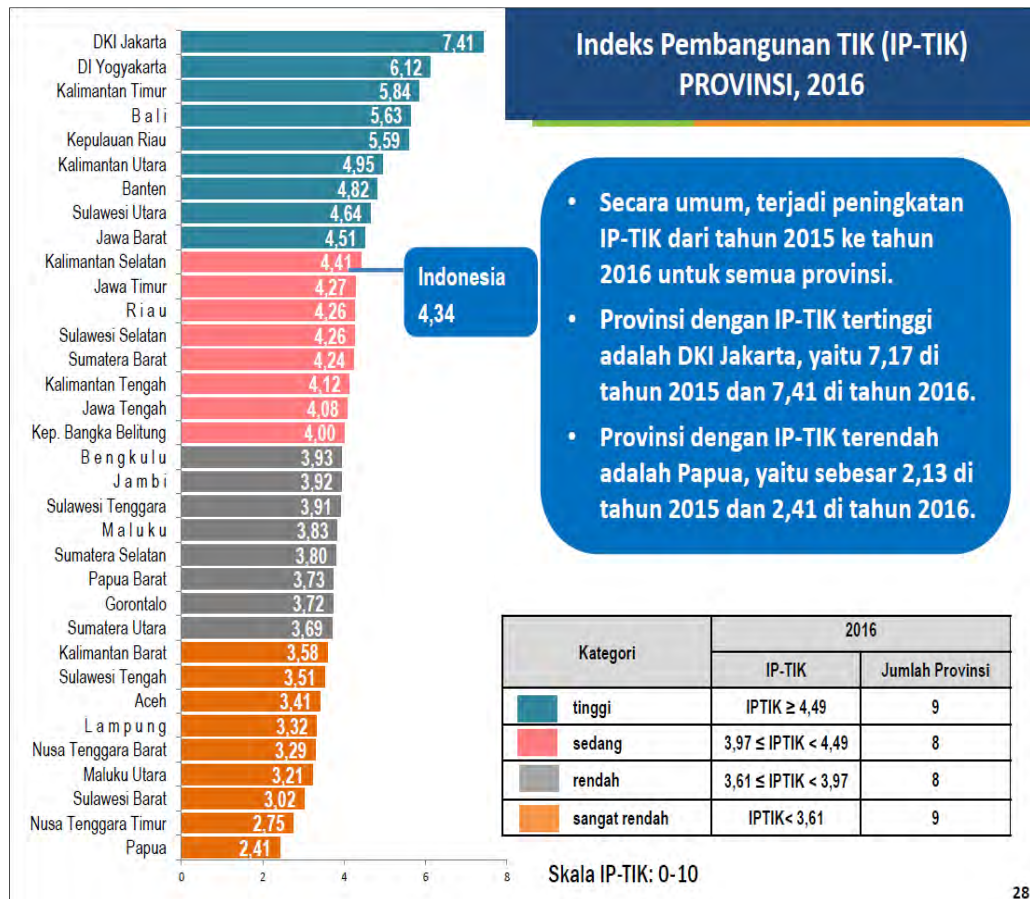


Dari Laporan Hasil Penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang diterbitkan oleh BPS RI tahun 2017, IP-TIK Jawa Barat periode 2012-2016 berada diklaster kategori tinggi (diatas angka nasional).

Dalam laporan IP-TIK juga disajikan hasil uji keterkaitan antara IP-TIK dengan indikator sosial-ekonomi. Diantaranya IP-TIK berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya negatif dengan angka kemiskinan.

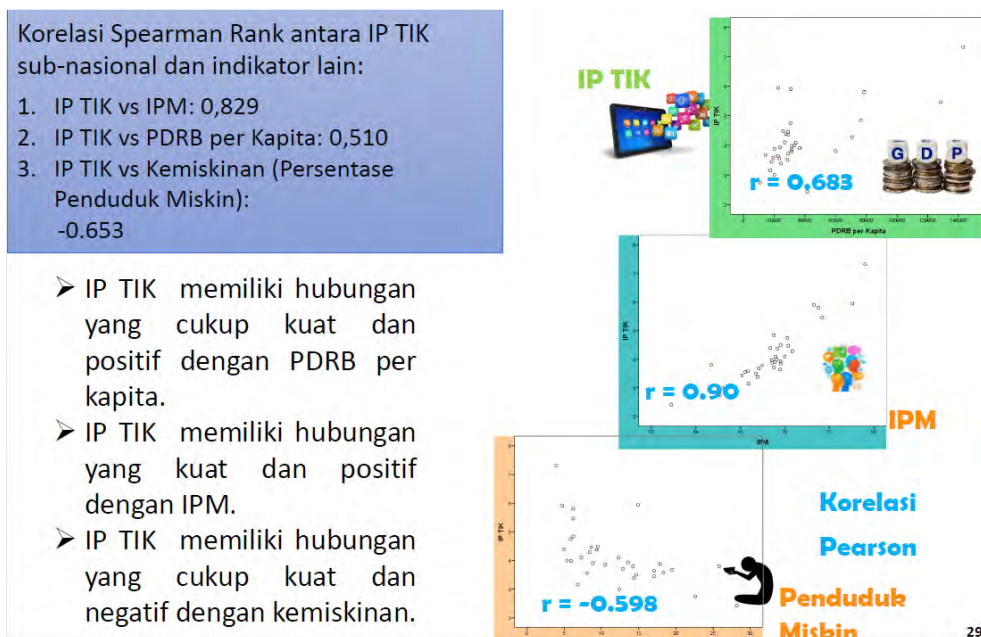
Dari gambaran diatas, Jawa Barat sangat mungkin melakukan peningkatan daya saing usaha UMKM berbasis inovasi melalui pemanfaatan TIK.

Gambar 2. Perbandingan IP-TIK Provinsi Tahun 2016



Sumber: Lestariningsih, Eni (2018)

Gambar 3. Tingkat Korelasi IP-TIK dengan IPM, PDRB perkapita, dan Kemiskinan

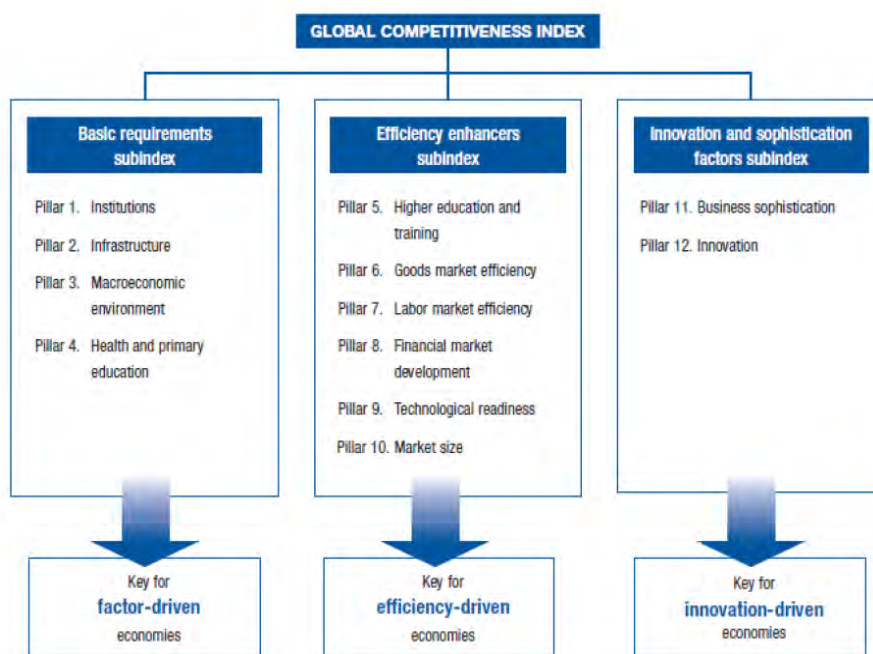


Dengan inovasi melalui pemanfaatan TIK yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, memperbaiki IPM sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Satu senjata, multiguna.

B. Metodologi

WEF mengukur daya saing negara dengan menggunakan indeks komposit yang diberi nama Indeks Daya Saing atau *The Global Competitiveness Index-GCI*. IDS tersebut diukur menggunakan 12 pilar; masing-masing pilar diukur dari beberapa indikator/variabel. Pilar-pilar tersebut dikelompokkan dengan menggunakan bobot berbeda (*different weights*). Secara diagram digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Kerangka Kerja Penghitungan IDS Global

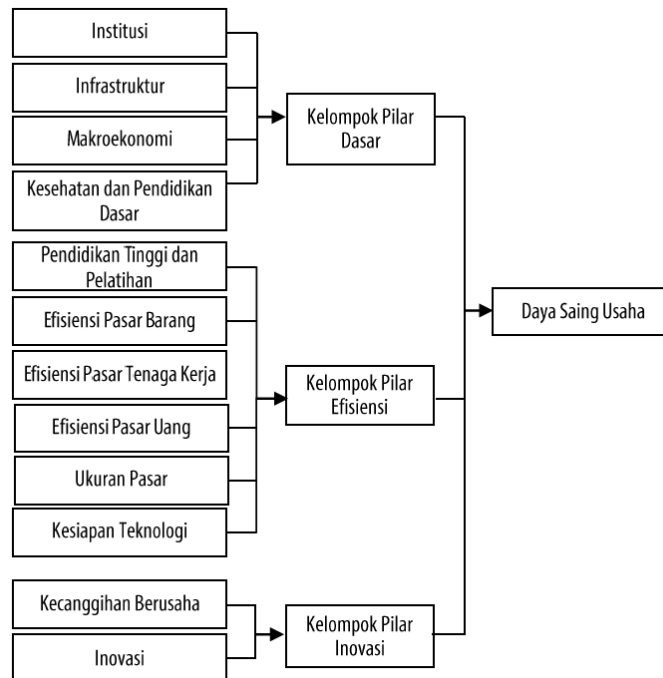


IDS UMKM ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek:

1. *User friendly*, kemudahan untuk dipahami dan digunakan berbagai kalangan;
2. Kajian literatur yang diperoleh dari berbagai sumber;
3. Ketersediaan data;
4. *Measurable*, mudah diukur;
5. *Reliable*, dapat diandalkan dan dipercaya sebagai tolok ukur yang relevan;

Data yang digunakan mencakup 74 variabel/indikator yang bersumber dari hasil SE2016 Lanjutan, juga dari data/statistik terkait lainnya (non SE), seperti Susenas, Sakernas, PDRB, dan lain-lain. Prosedur penghitungan IDS menggunakan metode Analisis Komponen Utama (AKU) atau *Principal Component Analysis* (PCA). Secara ringkas pengukuran IDS dirumuskan dalam bagan berikut:

Gambar 5. Kerangka Kerja Penghitungan IDS UMKM



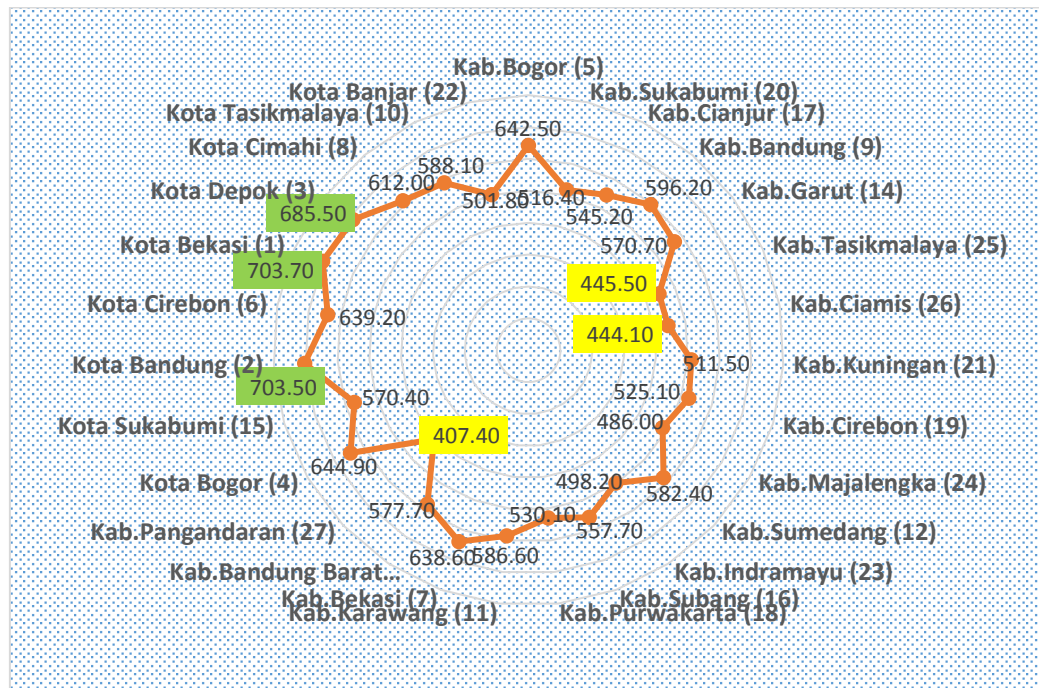
C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Daya Saing Usaha antar Wilayah

Secara umum daya saing usaha antar kabupaten/kota di Jawa Barat dari data olah hasil SE-2016 Lanjutan menunjukkan Kota Bekasi menempati peringkat tertinggi dengan skor 703,70 disusul Kota Bandung dengan selisih 0,20 yaitu skor 703,50. Ditempat ketiga ditempati Kota Depok dengan nilai 685,50. Kota Bekasi *leading* setelah 2 dari 3 komponen Kelompok Pilar (KP) sebagai pembentuk Indek Daya Saing (IDS), nilainya diatas Kota Bandung. Ketiganya merupakan pusat aktifitas utama yang menjadi jantung perekonomian Jawa Barat dan memiliki kedekatan baik secara geografis, struktur ekonomi, dan berbagai karakteristik Nasional lainnya.

Di sisi lain Pangandaran sebagai wilayah yang baru saja dimekarkan menempati posisi juru kunci dengan skor 407,40. Dan nahasnya, Ciamis sebagai wilayah induknya juga bernasib sama dengan menempati posisi kedua terakhir dengan nilai 444,10. Kebalikan dari Kota Bekasi, 2 dari 3 KP menempati posisi ke-26. Bahkan 9 dari 12 pilar skornya hanya sedikit diatas Pangandaran.

Gambar 6. Perbandingan Skor dan Peringkat Daya Saing Usaha antar Wilayah

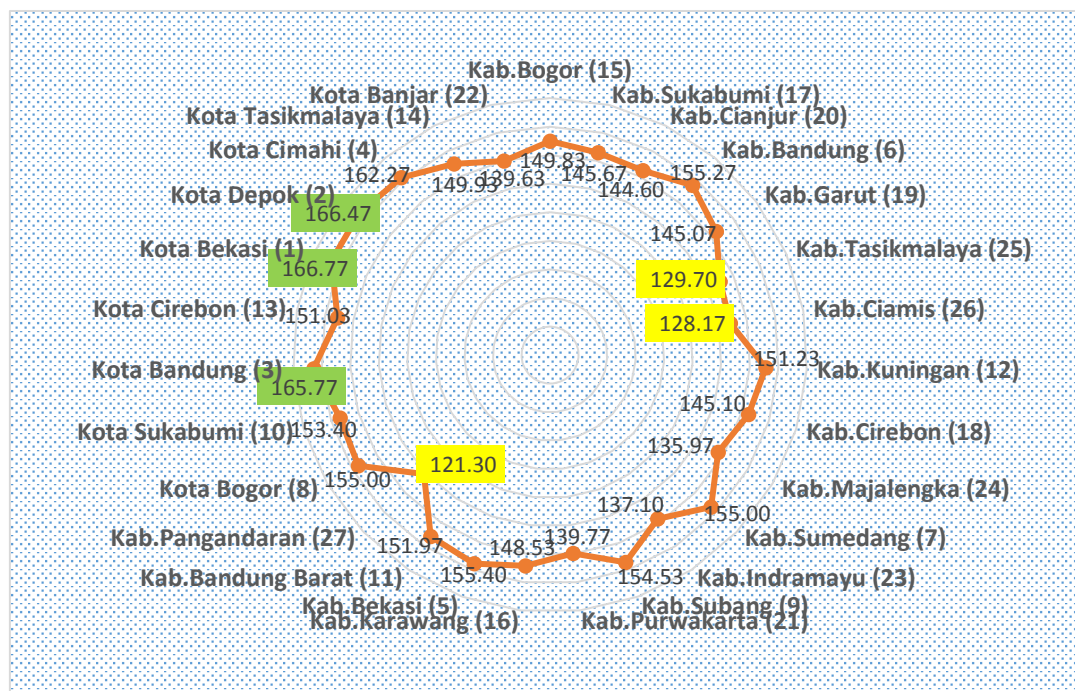


Sumber: data IDS diolah

2. Perbandingan Daya Saing UMKM antar Wilayah

Lima besar daya saing usaha untuk skala UMKM, secara berurutan peringkat pertama Kota Bekasi, diikuti Kota Depok, kemudian Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bekasi.

Gambar 7. Perbandingan Skor dan Peringkat Daya Saing Usaha UMKM antar Wilayah



Sumber: data IDS diolah

Pada skala UMKM usaha yang memiliki daya saing tinggi merupakan usaha pada kategori **P (Pendidikan)**, kemudian kategori **K (Asuransi dan Jasa Perbankan)**, dan kategori **Q (Kesehatan)**. Sedangkan daya saing terendah pada kategori **B (Pertambangan dan Penggalian)**, **E (Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, serta Aktivitas Remediasi)**, dan kategori **R (Jasa Rekreasi)**.

3. Potensi UMKM Jawa Barat

Besarnya porsi pelaku usaha UMKM di Jawa Barat sangat potensial, apabila dilakukan percepatan/akselerasi digitalisasi proses bisnisnya melalui penerapan TIK. Kondisi eksisting (data SE2016) pelaku UMK Jawa Barat hanya 6,27% yang menggunakan komputer, pengguna internetnya sekitar 10,56% -dengan tujuan utama sebatas sarana komunikasi (9,52%). Yang aktif menggunakan internet dalam aktifitas bisnis hanya berkisar 4-5%. Dengan keterbatasan literasi digital seperti ini, kontribusi ekonomi UMKM mencapai 28,27%.

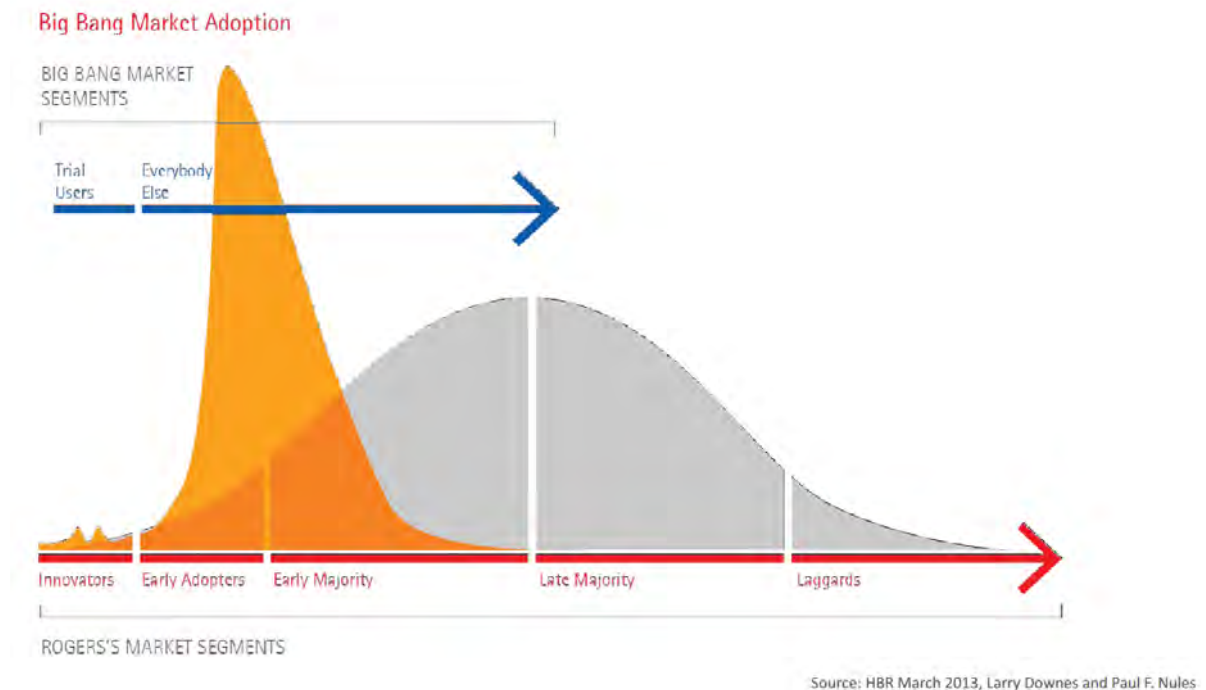
Serangkaian Program unggulan pemprov Jabar seperti *One Pesantren One Product* (OPOP) yang menysasar 9 Pondok Pesantren (Ponpes) saat launching dari sekitar 15 ribuan Ponpes se-Jawa Barat. Secara bertahap akan diterapkan ke seluruh wilayah. Program *One Village One Company* (OVOC) dengan membentuk badan usaha milik desa (Bumdes) layaknya sebuah perusahaan yang akan mengelola kegiatan usaha/bisnis berbasis komunitas di desa-desa. Program Desa Digital, dan lain-lain berpotensi meningkatkan kapasitas (*scale-up*) ekonomi UMKM.

Misal asumsi kapasitas valuasi ekonomi UMKM-nya naik menjadi 2x lipat saja, maka akan membalikan struktur ekonomi Jawa Barat yang saat ini ditopang industri skala besar menjadi dominan UMKM setidaknya berkontribusi 50%.

Cukup banyak program unggulan yang diluncurkan pemprov Jabar, namun akan sia-sia selama kesiapan dan kesanggupan SDM yang menjadi subyeknya tidak memadai. Beberapa Bis Wisata yang dibagikan misalnya, dilapangan ternyata tidak dioperasikan secara optimal dengan berbagai alasan. Ini menjadi bukti teori Difusi Inovasi. Apabila hanya fokus pada peningkatan infrastruktur statis, tidak diimbangi dengan pemberdayaan dan penguatan infrastruktur dinamis maka tidak terjadi akselerasi yang diinginkan.

Difusi inovasi yang dimaknai sebagai proses bagaimana suatu inovasi dikomunikasikan, diadopsi, dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat tertentu biasanya berbentuk kurva normal, membutuhkan waktu relatif lama, namun gambar diatas menunjukkan adanya pola percepatan yang disebut *Big Bang Market Adoption* pada beberapa produk yang memanfaatkan TIK. (Yulwardian, 2019).

Gambar 8. Perubahan Kurva Normal Inovasi Dengan Pemanfaatan TIK



Namun implementasi TIK bukan tanpa masalah atau efek samping, selain dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas, serta memperluas pasar, di sisi lain memunculkan persaingan bisnis yang tidak sehat. Dibutuhkan daya adaptasi yang tinggi dari pelaku usaha UMKM.

Jika dikaji lebih dalam, penentu IP-TIK terdiri dari 3, yaitu: Pertama, adalah Akses & Infrastruktur, bersifat pembangunan fisik yang relatif mudah diidentifikasi (misal: ketersediaan sinyal internet/BTS disuatu wilayah; kualitasnya (stabil/kuat atau lemah, *bandwith*nya besar atau kecil), dan nilai investasinya sejalan dengan biaya yang dikeluarkan. Kedua, adalah Penggunaan oleh masyarakat yang berdomisili diwilayah tersebut. Apakah optimal atau tidak, untuk tujuan produktif yang meningkatkan taraf ekonomi atau malah konsumtif. Ketiga, skill keahlian dari pengguna.

Untuk faktor terakhir, masih sangat sedikit yang memberi perhatian secara komprehensif berupa pembinaan, pelatihan secara terpadu, berkelanjutan.

Jika faktor pertama dapat kita sebut infrastruktur statis, sedangkan faktor kedua dan ketiga yang sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM dikenal sebagai infrastruktur dinamis. Seperti halnya kualitas SDM, tidak serta merta dapat direfleksikan dengan tingkat pendidikan, strata ekonomi, maupun usia. Padahal kualifikasi SDM-lah yang paling menentukan keberhasilan/eksistensi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, bahkan *scale-up* ke level yang lebih tinggi.

Disrupsi TIK yang merupakan gelombang realitas revolusi industri 4.0 ini bukan untuk ditolak atau dihadang, melainkan dioptimalkan dengan sebaik-baiknya dengan menyatupadukan berbagai pemangku kepentingan yang terkait secara terpadu, sinergis, dan harmonis di dalam kerangka Satu Data Pembangunan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem Satu Data Indonesia.

D. Simpulan

1. UMKM merupakan kekuatan ekonomi potensial di Jawa Barat.
2. Penanganan melalui kebijakan/program yang tepat sasaran dapat mendongkrak kontribusi UMKM.
3. Akselerasi digitalisasi ekonomi sangat mungkin dilakukan, dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, dan tingkat literasi digital SDM yang mumpuni.

E. Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2017). Laporan Hasil Penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Development Index*) Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Workshop Analisis Hasil Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan-Pedoman Analisis.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2019). Analisis Hasil SE2016 Lanjutan-Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil.
- Lestariningsih, Eni (2018). Sosialisasi Penyusunan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)/ *ICT Development Index*.
- Yulwardian, Elga (2019). Digital Evolution.
- Hanafi, Abdillah. 1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, *Communication of Innovations*, London: The Free Press.
- Rogers, Everett M., 1983, *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations, Forth Edition*. New York: Tree Press.
- Brown, Lawrence A., *Innovation Diffusion: A New Perpevtive*. New York: Methuen and Co.
- <https://wsmulyana.wordpress.com/2009/01/25/teori-difusi-inovasi/>

Lampiran

Tabel 1. Perbandingan Skor Daya Saing UMKM Menurut Kelompok Pilar, Pilar dan Wilayah

Wilayah	IDS	KP1	KP2	KP3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Kab.Bogor	149.83	114.07	114.00	165.80	137.60	153.17	64.60	71.40	36.33	28.83	143.43	148.87	64.33	23.50	257.33	36.00
Kab.Sukabumi	145.67	97.97	113.13	170.63	138.40	160.93	35.70	61.20	36.77	28.93	141.67	147.30	63.93	24.03	265.93	36.23
Kab.Cianjur	144.60	96.23	114.80	167.67	141.70	123.93	25.50	64.60	37.70	28.30	143.53	149.83	65.00	24.27	259.77	37.07
Kab.Bandung	155.27	124.87	113.83	170.77	137.43	169.83	69.70	95.20	38.17	29.00	141.83	146.63	65.90	23.03	263.53	38.80
Kab.Garut	145.07	92.77	115.53	171.33	144.70	168.43	22.10	57.80	40.17	28.27	142.97	151.00	65.70	22.97	263.77	39.37
Kab.Tasikmalaya	129.70	75.33	105.57	157.23	131.00	132.37	6.27	45.43	35.83	26.37	132.50	137.80	58.50	21.10	244.60	33.83
Kab.Ciamis	128.17	93.40	100.37	143.10	124.43	155.37	37.50	63.00	34.03	24.37	123.87	134.83	54.67	19.80	222.83	30.67
Kab.Kuningan	151.23	109.33	117.37	170.37	148.40	169.73	28.90	90.10	42.57	28.40	146.30	153.43	63.60	22.90	265.70	36.00
Kab.Cirebon	145.10	96.70	113.73	169.50	140.37	125.57	32.30	59.50	35.63	28.10	144.10	152.93	61.10	22.50	262.20	37.80
Kab.Majalengka	135.97	86.37	109.83	159.17	134.33	160.87	31.67	41.67	34.63	28.40	135.70	151.23	57.83	22.60	250.30	31.40
Kab.Sumedang	155.00	115.77	119.27	172.67	146.27	171.00	54.40	79.90	39.93	28.53	146.87	153.83	70.93	24.00	267.07	38.47
Kab.Indramayu	137.10	81.40	110.70	165.50	137.20	158.77	(8.17)	73.50	36.10	26.83	138.40	149.27	59.47	21.97	258.17	34.70
Kab.Subang	154.53	116.33	114.40	175.83	139.30	151.80	37.40	108.80	38.57	28.20	142.67	152.30	62.00	23.47	273.80	37.30
Kab.Purwakarta	139.77	97.47	108.50	160.77	135.83	166.27	53.90	40.83	36.97	27.00	134.47	143.27	59.53	22.80	248.47	35.97
Kab.Karawang	148.53	111.90	112.63	166.17	136.43	152.73	51.00	83.30	34.90	28.93	144.33	146.10	62.73	23.70	258.63	35.33
Kab.Bekasi	155.40	122.07	115.50	171.97	136.00	143.73	73.10	83.30	36.80	29.30	144.30	151.23	65.67	23.63	267.73	36.63
Kab.Bandung Barat	151.97	111.73	116.10	171.93	142.10	164.07	32.30	98.60	40.23	30.17	143.00	150.00	66.33	24.03	264.23	40.00
Kab.Pangandaran	121.30	76.00	98.83	142.30	119.87	143.33	27.00	34.50	33.70	25.30	120.90	132.23	53.37	21.83	222.80	28.93
Kota Bogor	155.00	137.37	111.63	161.37	136.50	200.93	99.63	91.47	37.03	27.50	138.33	145.23	65.27	21.97	248.03	37.63
Kota Sukabumi	153.40	126.57	114.63	163.67	143.57	193.13	100.00	55.00	38.60	27.77	141.23	150.30	66.00	22.63	252.33	37.37
Kota Bandung	165.77	159.13	117.43	164.03	136.23	232.67	130.00	113.33	39.13	28.97	143.07	150.90	71.87	23.20	251.27	39.07
Kota Cirebon	151.03	122.67	115.00	160.70	138.80	220.23	89.83	60.43	37.80	28.33	137.87	154.13	68.20	22.00	247.77	36.37
Kota Bekasi	166.77	161.60	114.97	166.80	133.40	200.60	118.33	140.00	36.80	28.67	140.83	150.33	68.43	22.60	256.17	39.17
Kota Depok	166.47	152.40	116.97	172.37	133.90	184.83	121.67	108.33	37.83	27.80	140.77	152.43	72.90	22.80	264.93	40.30
Kota Cimahi	162.27	151.20	114.87	164.47	140.20	162.13	101.67	123.33	41.80	28.03	138.13	148.20	69.10	22.37	249.93	41.03
Kota Tasikmalaya	149.93	109.03	115.17	169.50	137.30	212.93	52.70	73.10	38.33	27.73	144.63	152.13	63.67	22.80	263.40	36.53
Kota Banjar	139.63	115.97	103.63	149.27	129.03	198.03	81.27	64.40	35.70	26.47	130.07	139.07	53.80	20.70	232.40	31.77

Sumber: data IDS diolah (ket. Warna merah dibawah rata-rata, putih diatas rata-rata)

Tabel 2. Peringkat Daya Saing UMKM Menurut Kelompok Pilar, Pilar dan Wilayah

Wilayah	IDS	KP1	KP2	KP3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
Kab.Bogor	15	13	15	15	12	20	11	15	19	7	8	17	14	7	15	18
Kab.Sukabumi	17	18	18	8	11	16	18	19	18	5	14	19	15	2	4	17
Kab.Cianjur	20	21	12	12	6	27	24	16	13	13	7	15	13	1	12	13
Kab.Bandung	6	7	16	7	13	10	10	7	10	3	13	20	9	10	9	7
Kab.Garut	19	23	6	6	3	12	25	22	4	14	11	10	10	11	8	4
Kab.Tasikmalaya	25	27	24	24	24	25	26	24	21	25	24	25	23	25	24	23
Kab.Ciamis	26	22	26	26	26	19	16	18	26	27	26	26	25	27	26	26
Kab.Kuningan	12	16	3	9	1	11	22	9	1	10	2	3	17	12	5	18
Kab.Cirebon	18	20	17	10	7	26	19	21	23	16	6	4	20	19	11	9
Kab.Majalengka	24	24	22	23	21	17	21	25	25	10	22	8	24	18	19	25
Kab.Sumedang	7	12	1	2	2	9	12	12	5	9	1	2	3	4	3	8
Kab.Indramayu	23	25	21	16	15	18	27	13	20	23	18	16	22	22	14	22
Kab.Subang	9	10	14	1	9	22	17	4	8	15	12	6	19	8	1	12
Kab.Purwakarta	21	19	23	21	20	13	13	26	15	22	23	23	21	13	21	20
Kab.Karawang	16	14	19	14	17	21	15	10	24	6	4	21	18	5	13	21
Kab.Bekasi	5	9	7	4	19	23	9	10	16	2	5	8	11	6	2	14
Kab.Bandung Barat	11	15	5	5	5	14	19	6	3	1	10	14	7	2	7	3
Kab.Pangandaran	27	26	27	27	27	24	23	27	27	26	27	27	27	24	27	27
Kota Bogor	8	5	20	20	16	4	6	8	14	21	19	22	12	22	22	10
Kota Sukabumi	10	6	13	19	4	7	5	23	7	19	15	13	8	16	17	11
Kota Bandung	3	2	2	18	18	1	1	3	6	4	9	11	2	9	18	6
Kota Cirebon	13	8	9	22	10	2	7	20	12	12	21	1	6	21	23	16
Kota Bekasi	1	1	10	13	23	5	3	1	16	8	16	12	5	17	16	5
Kota Depok	2	3	4	3	22	8	2	5	11	18	17	5	1	13	6	2
Kota Cimahi	4	4	11	17	8	15	4	2	2	17	20	18	4	20	20	1
Kota Tasikmalaya	14	17	8	10	14	3	14	14	9	20	3	7	16	13	10	15
Kota Banjar	22	11	25	25	25	6	8	17	22	24	25	24	26	26	25	24

Sumber: data IDS diolah

Tabel 3. Perbandingan Skor Daya Saing UMKM Menurut Kelompok Pilar, Pilar dan Kategori

Kategori	IDS_1	KP1_1	KP2_1	KP3_1	P1	P2	P3_1	P4	P5	P6	P7	P8_1	P9	P10_1	P11_1	P12
B	178.40	145.50	144.83	179.77	170.57	225.00	75.53	104.83	37.37	36.80	206.47	198.97	58.23	29.90	277.93	40.13
C	223.10	179.80	163.40	245.40	212.73	274.80	94.70	125.20	45.93	49.57	215.67	224.07	73.93	38.50	379.97	54.63
D	224.47	170.77	179.03	241.10	205.13	255.07	88.33	117.60	52.43	48.77	221.23	226.90	115.97	32.20	375.43	51.17
E	214.37	175.17	158.90	232.00	213.90	260.67	89.03	118.33	50.57	40.53	218.50	214.03	66.20	32.93	363.87	46.87
F	259.47	190.53	190.50	301.20	237.73	278.67	94.70	125.20	52.90	61.13	228.03	241.37	130.63	35.13	485.23	47.47
G	226.00	176.27	167.27	251.97	204.60	277.40	94.70	125.20	51.37	48.37	227.13	230.27	67.30	35.43	391.37	54.87
H	238.47	182.43	181.03	263.97	219.43	268.07	94.70	125.20	55.83	43.20	231.73	248.17	90.03	40.33	407.60	59.83
I	233.37	178.40	169.60	266.60	212.83	270.13	92.93	123.80	54.20	42.67	224.73	234.87	71.27	39.43	408.40	62.97
J	239.67	173.70	184.83	270.83	198.40	279.63	94.70	125.20	55.07	43.20	221.07	231.13	129.80	36.83	411.70	68.00
K	265.30	194.13	203.97	298.43	247.03	280.33	94.70	125.20	94.13	43.20	234.40	251.83	127.23	35.70	450.97	77.37
L	227.27	170.53	170.53	256.60	194.37	269.83	94.13	121.97	50.53	41.60	223.23	238.90	78.33	35.33	396.53	57.40
M	249.37	185.70	194.20	275.47	228.30	275.57	94.10	124.43	64.87	42.67	218.90	239.73	147.73	36.87	430.70	56.73
N	239.50	179.07	180.43	270.87	211.13	276.27	94.70	125.20	53.90	43.20	224.17	240.20	104.53	38.97	419.87	59.63
P	270.93	207.87	207.73	297.37	279.03	273.63	94.70	125.20	94.70	43.20	217.97	253.13	153.33	36.47	458.63	67.57
Q	262.17	199.70	199.37	290.47	261.00	274.97	94.10	124.43	91.07	42.67	220.57	256.20	124.97	35.03	447.30	67.03
R	220.67	168.97	168.57	243.60	196.17	260.97	90.40	120.60	50.07	41.07	214.30	227.47	90.03	37.07	375.77	55.17
S	231.97	177.10	174.20	259.23	207.93	276.40	94.10	124.43	57.13	42.67	217.67	237.60	90.30	37.07	401.83	56.90

Sumber: data IDS diolah (ket. Warna merah dibawah rata-rata, putih diatas rata-rata)

Tabel 4. Peringkat Daya Saing UMKM Menurut Kelompok Pilar, Pilar, dan Kategori

Kategori	IDS	KP1	KP2	KP3	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
B	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
C	14	7	15	13	9	9	1	1	16	2	15	15	13	4	13	13
D	13	14	9	15	12	16	16	16	11	3	8	14	7	16	15	14
E	16	12	16	16	7	15	15	15	13	16	12	16	16	15	16	16
F	4	4	5	1	4	3	1	1	10	1	3	5	3	13	1	15
G	12	11	14	12	13	4	1	1	12	4	4	12	15	11	12	12
H	8	6	7	9	6	13	1	1	6	5	2	4	10	1	9	6
I	9	9	12	8	8	11	13	12	8	10	5	10	14	2	8	5
J	6	13	6	7	14	2	1	1	7	5	9	11	4	8	7	2
K	2	3	2	2	3	1	1	1	2	5	1	3	5	10	3	1
L	11	15	11	11	16	12	9	13	14	14	7	8	12	12	11	8
M	5	5	4	5	5	7	10	9	4	10	11	7	2	7	5	10
N	7	8	8	6	10	6	1	1	9	5	6	6	8	3	6	7
P	1	1	1	3	1	10	1	1	1	5	13	2	1	9	2	3
Q	3	2	3	4	2	8	10	9	3	10	10	1	6	14	4	4
R	15	16	13	14	15	14	14	14	15	15	16	13	10	5	14	11
S	10	10	10	10	11	5	10	9	5	10	14	9	9	5	10	9

Sumber: data IDS diolah

Tabel 5. Daftar Variabel/Indikator dan Statistik Uji AKU yang digunakan

No	Pilar	Kode Subpilar /Indikator	Uraian	Sumber	Arah	Kriteria Statistik Uji					Proses	Faktor
						KMO ≥0,5	Bartlett's Test <0,005	Anti Image Correlation ≥0,5	Communi- calities ≥0,4	Korelasi bukan yg terkecil		
1	1	P101	Persentase perusahaan berbadan hukum PT/CV/Firma	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
2	1	P102	Persentase perusahaan perwakilan asing di wilayah	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
3	1	P103	Persentase perusahaan tidak berbadan usaha	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
4	1	P104	Persentase perusahaan mulai beroperasi secara komersial	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
5	1	P105	Persentase perusahaan menjadi anggota asosiasi	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
6	1	P106	Persentase perusahaan mengalami kendala pada peraturan birokrasi pemerintah	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
7	1	P107	Persentase perusahaan mengalami kendala pungutan liar	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
8	1	P108	Persentase perusahaan yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
9	1	P109	Persentase perusahaan yang pelatihannya di fasilitasi pemerintah	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
10	1	P110	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan AMDAL	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
11	1	P111	Persentase perusahaan memiliki koperasi untuk pekerja	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1
12	1	P112	Persentase perusahaan yang jaminan asuransi kesehatan pekerjanya ditanggung perusahaan	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_1, FAC2_1, FAC3_1

13	2	P201	Persentase perusahaan yang mengalami kendala infrastruktur	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_2, FAC2_2
14	2	P202	Persentase perusahaan yang mengalami kendala BBM dan energi	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_2, FAC2_2
15	2	P203	Persentase perusahaan dengan sumber air "pipanisasi"	SE2016	Positif	1	1	1	0	1	1	FAC1_2, FAC2_2
16	2	P204	rasio panjang jalan (Kab+Prov+Na sional)/luas wilayah	Non-SE	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_2, FAC2_2
17	2	P205	jumlah pelabuhan laut	Non-SE	Positif	1	1	1	0	1	1	FAC1_2, FAC2_2
18	2	P206	jumlah pelabuhan udara	Non-SE	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_2, FAC2_2
19	2	P207	jumlah stasiun kereta api aktif	Non-SE	Positif	1	1	1	0	1	1	FAC1_2, FAC2_2
20	2	P208	rasio elektrifikasi	Non-SE	Positif	1	1	1	0	1	1	FAC1_2, FAC2_2
21	3	P301	PDRB perkapita Kab/Kota	Non-SE	Positif	0	1	1	1	1	1	FAC1_3, FAC2_3; FAC1_15, FAC2_15
22	3	P302	Tingkat Inflasi	Non-SE	Negatif	0	1	0	0	0	0	FAC1_3, FAC2_3; FAC1_15, FAC2_15
23	3	P303	Rasio PAD terhadap PDRB Kab/Kota	Non-SE	Positif	0	1	0	1	1	1	FAC1_3, FAC2_3; FAC1_15, FAC2_15
24	3	P304	Angka IPM	Non-SE	Positif	0	1	1	1	1	1	FAC1_3, FAC2_3; FAC1_15, FAC2_15
25	3	P305	Gini Rasio Kab/Kota	Non-SE	Negatif	0	1	0	1	1	1	FAC1_3, FAC2_3; FAC1_15, FAC2_15
26	3	P306	Persentase penduduk miskin Kab/Kota	Non-SE	Negatif	0	1	1	1	1	1	FAC1_3, FAC2_3; FAC1_15, FAC2_15
27	4	P401	Angka kesakitan penduduk (Morbidity Rate)	Non-SE	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_4
28	4	P402	Angka Harapan Hidup	Non-SE	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_4
29	5	P501	Persentase pekerja dengan tingkat pendidikan SMK dan minimal Diploma terhadap total pekerja	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_5
30	5	P502	Persentase perusahaan dengan pekerja mengikuti pelatihan manajerial	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_5

31	5	P503	Persentase perusahaan dengan pekerja mengikuti pelatihan teknik produksi	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_5
32	5	P504	Persentase perusahaan dengan pekerja mengikuti pelatihan pemasaran	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_5
33	5	P505	Persentase perusahaan dengan pekerja >50% telah mengikuti pelatihan	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_5
34	6	P601	Persentase perusahaan dengan bahan baku utamanya dari "dalam Kab/Kota sendiri"	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_6
35	6	P602	Persentase perusahaan dengan bahan baku utamanya dari "Kab/Kota lain namun provinsi sama"	SE2016	Positif	1	1	1	0	1	1	FAC1_6
36	6	P603	Persentase perusahaan dengan bahan baku utamanya dari "provinsi lain"	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_6
37	7	P701	Persentase perusahaan yang mengalami kendala tenaga kerja	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
38	7	P702	Persentase perusahaan yang memiliki serikat pekerja	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
39	7	P703	Persentase perusahaan yang sudah menerapkan UMR	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
40	7	P704	Persentase perusahaan dengan sumber perekrutan tenaga kerja dari lembaga pendidikan formal	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
41	7	P705	Persentase perusahaan dengan sumber perekrutan tenaga kerja dari lembaga pendidikan non-formal	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
42	7	P706	Persentase perusahaan dengan sumber perekrutan tenaga kerja dari BLK	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7

43	7	P707	Persentase perusahaan dengan sumber perekrutan tenaga kerja dari Agen tenaga kerja	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
44	7	P708	Persentase perusahaan dengan sumber perekrutan tenaga kerja dari bursa iklan	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_7, FAC2_7, FAC3_7
45	8	P801	Persentase perusahaan pernah menerima kredit lembaga keuangan	SE2016	Positif	0	1	0	1	0	0	FAC1_8, FAC2_8
46	8	P802	Persentase perusahaan SULIT prosedur mengajukan kredit	SE2016	Negatif	0	1	0	1	1	1	FAC1_8, FAC2_8; FAC1_9
47	8	P803	Persentase perusahaan tidak mengajukan kredit karena suku bunga tinggi	SE2016	Negatif	0	1	0	1	1	1	FAC1_8, FAC2_8; FAC1_9
48	8	P804	Persentase perusahaan mengalami kendala permodalan/likuiditas	SE2016	Negatif	0	1	0	1	1	1	FAC1_8, FAC2_8; FAC1_9
49	9	P901	Persentase perusahaan menggunakan PC	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_10
50	9	P902	Persentase perusahaan menggunakan internet	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_10
51	9	P903	Persentase perusahaan menggunakan internet untuk komunikasi	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_10
52	9	P904	Persentase perusahaan menggunakan internet untuk mencari informasi	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_10
53	10	P1001	Persentase perusahaan dengan pasar utama dalam Kab/Kota	SE2016	Positif	0	1	0	1	0	0	FAC1_11, FAC2_11
54	10	P1002	Persentase perusahaan dengan pasar utama keluar Kab/Kota dalam 1 provinsi	SE2016	Positif	0	1	0	1	1	1	FAC1_11, FAC2_11; FAC1-12
55	10	P1003	Persentase perusahaan dengan pasar utama ke provinsi lain	SE2016	Positif	0	1	1	1	1	1	FAC1_11, FAC2_11; FAC1-12
56	10	P1004	Persentase perusahaan dengan pasar	SE2016	Positif	0	1	0	1	1	1	FAC1_11, FAC2_11; FAC1-12

			utama ke dalam negeri									
57	10	P1005	Persentase perusahaan dengan pasar utama ke luar negeri	SE2016	Positif	0	1	1	0	1	1	FAC1_11, FAC2_11; FAC1-12
58	11	P1101	Persentase perusahaan memiliki sertifikat nasional/internasional	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
59	11	P1102	Persentase perusahaan memiliki sertifikat nasional	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
60	11	P1103	Persentase perusahaan memiliki sertifikat internasional	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
61	11	P1104	Persentase perusahaan yang mengalami kendala bahan baku	SE2016	Negatif	1	1	1	0	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
62	11	P1105	Persentase perusahaan yang mengalami pemasaran	SE2016	Negatif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
63	11	P1106	Persentase perusahaan yang mengalami persaingan usaha	SE2016	Negatif	1	1	0	1	0	0	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
64	11	P1107	Persentase perusahaan dengan prospek baik	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
65	11	P1108	Persentase perusahaan dengan laba meningkat	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
66	11	P1109	Persentase perusahaan dengan rencana memperluas usaha	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_13, FAC2_13, FAC3_13
67	12	P1201	Persentase perusahaan menggunakan internet untuk pemasaran/iklan	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14
68	12	P1202	Persentase perusahaan menggunakan internet untuk penjualan/pembelian	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14
69	12	P1203	Persentase perusahaan yang melakukan litbang	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14
70	12	P1204	Persentase perusahaan yang melakukan inovasi produk	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14

71	12	P1205	Persentase perusahaan yang melakukan inovasi proses	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14
72	12	P1206	Persentase perusahaan yang melakukan inovasi pemasaran	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14
73	12	P1207	Persentase perusahaan yang melakukan inovasi manajerial	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14
74	12	P1208	Persentase perusahaan melakukan pelatihan sendiri	SE2016	Positif	1	1	1	1	1	1	FAC1_14